

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari

Sulistiana Silondae¹, Nasrul², La Ode Bahana Adam³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari

Correspondence		
Email: anasilondae64@gmail.com		No. Telp: 081232209477
Submitted: 12 Oktober 2023	Accepted: 21 Oktober 2023	Published: 22 Oktober 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis kemandirian keuangan daerah Kota Kendari. Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2020-2022. Rancangan Penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan instansi BKAD Kota Kendari dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kendari tahun 2020-2022. Analisis data menggunakan teknik analisis data kuantitatif Model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kendari jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Kota Kendari tahun 2020 berjalan Efektif karena efektivitasnya diatas 100% yaitu sebesar 101,28%. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 Tidak Efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 100% yaitu sebesar 61,08% dan 77,86%. (2) Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kendari jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Kendari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebesar 103,69% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan 2022 rasionya masing-masing sebesar: 95,13%, 104,29% dan 111,65%.

Kata kunci: *Kemandirian Keuangan, Efektivitas, Efisiensi*

Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor penentu dalam proses Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata di setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya agar kesejahteraan dapat tercapai. Karena itulah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah agar masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah berarti penyerahan sebagian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri.

Tujuan lain dari pelaksanaan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dan mendorong kemampuan daerah untuk menggali potensi sumberdaya yang dimilikinya sehingga daerah menjadi lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan manusia, terutama bagi kabupaten/kota sebagai motor pelaksanaan kebijakan tersebut (Kurnia, 2011).

Penerapan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam pembagian bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu bagian yang paling penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan daerahnya sendiri dalam rangka perwujudan otonomi daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembiayaan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber dan pendapatan yang diperlukan daerah. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi komponen dalam administrasi public yang sama dengan halnya desentralisasi fiskal.

Selain itu, keberhasilan otonomi daerah tidak akan terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting. Dalam hal ini pemerintah daerah harus bisa menjalankan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisiensi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan. Dalam mewujudkan otonomi daerah, setiap daerah otonom harus mampu dalam mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri.

Ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu terlihat dari kemampuan keuangan daerah tersebut dalam menggali sumber keuangan yang ada di daerahnya, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan yang utama.

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini lebih mengarah pada aspek kemandirian pemerintah daerah, terutama bidang pengaturan penerimaan dan pengeluaran keuangan atau desentralisasi fiskal, yang dapat diukur dengan derajat otonomi fiskal, melalui perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kontribusi sumbangan dan bantuan terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Syamsuddin Haris, 2007).

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri, pertama jika daerah tidak lagi bergantung pada dana bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat. Kedua, jika daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Berbagai penelitian empiris hingga saat ini masih membuktikan bahwa angka ketergantungan daerah pemerintah pusat (khususnya dalam hal pendanaan APBD) masih tinggi. Disamping itu Pemerintah sangat mengharapkan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dimekarkan dapat menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya mampu secara efektif dan efisien.

Pengalaman menunjukan bahwa hampir semua daerah persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Umumnya APBD suatu daerah di Indonesia didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan Sumbangan Lain-lain yang diatur dalam Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas.

Salah satu penelitian yang mengkaji tentang kemandirian keuangan daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Shabiya Aqila (2021) yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Dengan kesimpulan bahwa pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota provinsi Jambi masih belum bisa mandiri dalam menjalankan otonomi daerahnya masing-masing karena tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi, dan juga pemerintah daerah pada setiap kabupaten/kota provinsi Jambi masih belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

Penelitian lain pula yang serupa mengkaji tentang kemandirian keuangan daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratna Shaliqah (2011) yang berjudul Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000 – 2009. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten Wonogiri dalam beberapa tahun anggaran telah mandiri dalam menjalankan otonomi daerahnya. Hal ini disebabkan karena tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten Wonogiri terhadap pemerintah pusat dalam beberapa tahun anggaran sudah tidak terlalu tinggi atau rendah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mampu untuk memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa sektor strategis.

Kota Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Secara administratif, di wilayah kota Kendari terdapat 11 kecamatan dan 65 kelurahan. Komoditas utama di kota Kendari berasal dari sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Komoditas unggulan dari sektor perkebunan berupa kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, dan lada. Sementara itu, komoditas unggulan dari sub-sektor pertanian, yakni jagung dan ubi kayu. Adapun sektor komoditas lainnya berupa sektor jasa, yaitu pariwisata (diakses: 5 Agustus 2023).

Data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari mengenai Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 s/d 2021 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Kendari

Tahun	Realisasi PAD (Juta)	Dana Perimbangan (Juta)	Lain Lain Pendapatan Yang Sah (Juta)
1	2	3	4
2019	215.330,98	940.448,05	160.037,52
2020	221.823,16	871.013,52	124.608,95
2021	351.818,58	917.375,22	245.167,09

Sumber : Data BPS Kota Kendari Tentang LRA Kota Kendari Tahun 2019 s/d 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa secara umum PAD Kota Kendari terus meningkat pada kurun waktu 2019-2021. Namun masih terdapat beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut ialah dana perimbangan Kota Kendari yang lebih besar dari perolehan PAD menyebabkan Kota Kendari masuk dalam kategori rendah dalam hal kemandirian keuangan daerah, meskipun realisasi PAD dan lain lain pendapatan yang sah Kota Kendari fluktuatif atau belum meningkat secara tetap, akan tetapi dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan desentralisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari”

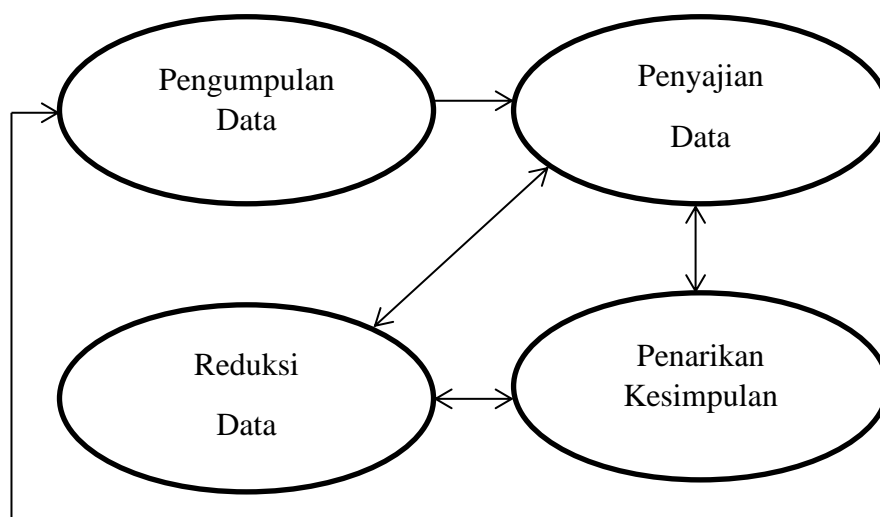
Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Amirullah (2015) metode deskriptif adalah salah satu penelitian yang menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Menurut Sutanto (2013) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel. Jadi metode deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif Model Miles and Huberman. Menurut Sugiyono (2014:91) teknik analisis data kualitatif Model Miles and Huberman adalah sebagai berikut:



Sumber : Miles dan Huberman (Sugiyono 2018)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan kondisi di tempat penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kendari tahun 2020 - 2022 dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari tempat penelitian akan segera dianalisis melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk tabel, bagan, dan uraian singkat, yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang benar. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk menilai kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari dengan menggunakan instrumen analisis rasio keuangan terhadap APBD yaitu diantaranya, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD.

4. Penarikan Kesimpulan

Penjelasan dari hasil analisis data selanjutnya akan dideskripsikan kembali sebagai kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Analisa Data

1. Gambaran PAD Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tabel 2. PAD dan Realisasi PAD Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2020	219.014.583.473,00	221.823.160.959,05
2021	488.128.324.489,00	298.135.724.193,21
2022	433.127.184.360,00	337.218.594.086,00

Sumber: LRA Kota Kendari Tahun 2020 – 2022 (Diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dan 2022 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat jauh dari anggaran PAD yang diharapkan Pemerintah Kota Kendari. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi PAD sebesar Rp. 221.823.160.95,05 melebihi dari anggaran PAD yang diharapkan. Walaupun demikian secara keseluruhan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah realisasi PAD yang berarti bahwa Pemerintah Kota Kendari selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas penerimaan dari dalam daerah.

2. Gambaran Aspek Pembiayaan Keuangan Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tabel 3. Pembiayaan Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tahun Anggaran	Anggaran Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pembiayaan (Rp)
2020	39.903.711.627,34	39.914.147.945,34
2021	463.675.311.057,00	179.837.401.883,72
2022	379.481.142.323,00	380.365.756.831,93

Sumber: LRA Kota Kendari Tahun 2020 – 2022 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan Kota Kendari terus meningkat. Adapun peningkatan tertinggi untuk realisasi pembiayaan Kota Kendari terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 380.365.756.831,93. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi pembiayaan Kota Kendari turun hingga mencapai Rp. 39.914.147.945,34.

3. Gambaran Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tabel 4. Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Daerah (Rp)
2020	1.376.450.258.113,34	1.198.598.921.297,46
2021	2.039.699.714.714,00	1.449.741.172.154,00
2022	1.987.898.818.559,00	1.652.002.322.614,00

Sumber: LRA Kota Kendari Tahun 2020 – 2022 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari tahun 2020 – 2022 cenderung terus meningkat. Realisasi anggaran belanja daerah tertinggi berada pada tahun 2022 yakni Rp. 1.652.022.322.614,00.

4. Gambaran Ketergantungan Daerah Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tabel 5. Pendapatan Transfer Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)
2020	1.070.577.773.013,00	988.679.243.309,00
2021	1.025.006.476.576,00	1.047.710.204.713,00
2022	1.149.759.869.693,00	1.131.464.794.074,00

Sumber: LRA Kota Kendari Tahun 2020 – 2022 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan transfer atau dana perimbangan yang diterima oleh Kota Kendari dari tahun 2020 – 2022. Hingga tahun 2022 pendapatan transfer untuk Kendari mencapai Rp. 1.131.464.794.074,00. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kendari masih sangat bergantung dana perimbangan untuk membiayai keuangan daerahnya

5. Rasio Efektifitas PAD

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (%)	REPAD (%)	Standar	Kriteria
2020	219.014.583.473,00	221.823.160.959,05	101,28	> 100%	Sangat Efektif
2021	488.128.324.489,00	298.135.724.193,21	61,08	< 75%	Tidak Efektif
2022	433.127.184.360,00	337.218.594.086,00	77,86	75% - 89%	Kurang Efektif

Sumber: LRA Kota Kendari Tahun 2020 – 2022 (Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari pada tahun 2021 tergolong tidak efektif karena nilai yang diperoleh sebesar 61,08% masih jauh dibawah standar. Sedangkan pada tahun 2022 tergolong kurang efektif, karena nilai yang diperoleh sebesar 77,86% masih berada dalam rentang 75% - 89%. Sedangkan untuk tahun 2020 sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 101,28%.

6. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Kendari Tahun 2020 – 2022

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (%)	REKD (%)	Standar	Kriteria
2020	1.198.598.921.297,46	1.259.934.479.368,05	0,95	< 10%	Sangat Efisien
2021	1.450.741.172.154,00	1.391.085.054.986,21	1.04	< 10%	Sangat Efisien
2022	1.652.002.322.614,00	1.479.657.784.099,00	1.12	< 10%	Sangat Efisien

Sumber: LRA Kota Kendari Tahun 2020 – 2022 (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2020 – 2022 tergolong sangat efisien karena nilai rasionya secara keseluruhan kurang dari 10% yang berarti bahwa realisasi belanjanya kurang dari realisasi pendapatan daerah.

Pembahasan

1. Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Kendari pada dari tahun 2020 hingga tahun 2022 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 PAD dianggarkan sebesar Rp. 219.014.583.473,00 atau 16,38% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2021 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp. 488.128.324.489,00 atau 30,97% dari total anggaran pendapatan. Sedangkan pada tahun 2022 PAD terjadi penurunan yang dianggarkan sebesar Rp. 433.127.184.360,00 atau 22,79% dari total anggaran pendapatan.

Sedangkan Realisasi PAD Kota Kendari dari tahun 2020 sampai dengan 2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PAD Kota Kendari sebesar Rp 221.823.160.959,05 atau sebesar 17,60% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu menjadi Rp. 298.135.724.193,21 atau sebesar 21,43% dari total pendapatan. Dan pada tahun 2022 PAD Kota Kendari naik kembali menjadi Rp. 337.218.594.086,00 atau sebesar 22,79% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.5 dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Kota Kendari pada tahun 2020 sebesar 101,28%, tahun 2021 sebesar 61,08%, dan tahun 2022 sebesar 77,86%. Efektivitas PAD Kota Kendari untuk tahun 2020 sudah masuk dalam kategori efektif karena tingkat efektivitasnya sudah berada diatas 100%. Sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 Efektivitas PAD Kota Kendari masih masuk dalam kategori Tidak Efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 5.5. Efektivitas Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kendari masuk dalam kategori tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100% yaitu 80,07%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi cukup kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Kendari juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Kendari harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah Kota Kendari sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Darah Kota Kendari harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik

melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.6 diketahui realisasi total belanja daerah Kota Kendari dari tahun 2020 sampai dengan 2022 rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 belanja daerah Kota Kendari sebesar Rp. 1.198.598.921.297,46, naik menjadi Rp 1.450.741.172.154,00 pada tahun 2021. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.652.002.322.614,00.

Total pendapatan daerah Kota Kendari dari tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2020 total pendapatan daerah sebesar Rp 1.259.934.479.368,05. Mengalami kenaikan sebesar 10,40% atau menjadi Rp 1.391.085.054.986,21 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 total pendapatan daerah sebesar Rp 1.479.657.784.099,00 naik 6,37% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.6 juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kendari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebesar 103,69% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Pada tahun 2020 rasio efisiensinya sebesar 95,13%, kemudian tahun 2021 menjadi 104,29%, dan tahun 2022 sebesar 111,65.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Kendari tergolong masih Tidak Efisien karena rata-rata rasionya 103,69% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 tersebut Pemerintah Kota Kendari sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah Kota Kendari dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Kesimpulan

1. Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kendari jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Kota Kendari tahun 2020 berjalan Efektif karena efektivitasnya diatas 100% yaitu sebesar 101,28%. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 Tidak Efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 100% yaitu sebesar 61,08% dan 77,86%.
2. Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kendari jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Kendari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebesar 103,69% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan 2022 rasionya masing-masing sebesar: 95,13%, 104,29% dan 111,65%.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian dilingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

REFERENSI

- _____. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Adi, Priyo Hari. 2012. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin. Vol. XXI No.1. Hal 1-9.
- Amirullah. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Jakarta. Universitas Gajah Mada.
- Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat.
- Darise, Nurlan. 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 1. Jakarta: PT. Indeks.
- Firdausy, Carunia. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Cetakan pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.
- Fraser Lyn M dan Aileen Ormiston.2008. Memahami Laporan Kuangan edisi Ketujuh. Alih Bahasa: Sam Setyautama. Penerbit Indeks:Jakarta
- Frengky Ullo, 2022. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Monokwari. STIE Port Numbay. Jayapura.
- Haris, Syamsuddin. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press. Jakarta.
- Hasanudin, Mohamad., Prihatiningsih. 2010. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga Kredit, Non Performance Loan (NPL), dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah. TEKNIS. Vol. 5. No. 1. April 2010. hal. 25-31.
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairul Muluk, 2006. Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah. Bayumedia. Publishing. Malang.
- Kurnia Sari, Ayu. 2011. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Prov. Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Pemerintah Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Pheni Chalid. 2005. Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan. Jakarta: Kemitraan Partnership.

- Riswati, Anindita P., 2021. Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. JEKP. Fakultas Manajemen Pemerintahan. IPDN.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Syamsi Ibnu.1986. Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tilawatil C, Rina F., 2019. Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan Indeks Williamson Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Menara Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Baiturrahmah.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah